

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 17 TAHUN 1953

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BEBERAPA PERWIRA DARI ANGKATAN LAUT
SEBAGAI HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN-PENGADILAN TENTARA DI DJAWA
DAN MADURA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu untuk membebaskan para perwira Angkatan Laut yang kini telah lebih dari dua tahun memangku jabatan Hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Jawa dan Madura dari jabatan tersebut dan mengganti mereka dengan perwira-perwira Angkatan Laut lainnya;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52-tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan"
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.16 tahun 1950;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada:
- a. Pengadilan-pengadilan Tentara di Djakarta, Bandung, Pekalongan dan Semarang:
 1. Major AMIN DANAL, perwira Angkatan Laut;
 2. Kapten SINGOTARUNO, perwira Angkatan Laut;
 3. Kapten SUSILO, perwira Angkatan Laut;
 4. Kapten IMAN SUTOPO, perwira Angkatan Laut; yang dulu berpangkat acting Major dan sekarang berpangkat Kapten;
 - b. Pengadilan-pengadilan Tentara di Jogjakarta (termasuk: Surakarta), Surabaya dan Malang:
 1. Major HADIWINARSO, perwira Angkatan Laut;
 2. Kapten SUHARDI RANUSUBROTO, perwira Angkatan Laut;
- II. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada:
- a. Pengadilan-pengadilan Tentara di Djakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang dan Jogjakarta:
 1. Major R.E. MARTADINATA, Pa.Planning/Pa.S.O.IV. S.A.L.;
 2. Major E.H. THOMAS; WR. Kepala Personalia Militer Angkatan Laut;
 - b. Pengadilan-pengadilan Tentara di Surabaya dan Malang:
 1. Kapten IMAN SUTOPO, Kmd. Kesatrijan, Ujung Pasiran;
 2. Kapten ALI SADIKIN, Kepala Staf Korps Komando A.L.

III.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Pebruari 1953.

S. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno
SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN s.l.,

Wilopo
WILOPO.

MENTERI KEHAKIMAN,

Loekman Wiradinata
LOEKMAN WIRIADINATA.